



PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



RENCANA KERJA TAHUN 2024





PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA TAHUN 2024



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
NOMOR : SK.059/P3E.Papua/KBTU/REN.4.4/11/2023

TENTANG
RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TAHUN 2024

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan tugas bidang lingkungan hidup dan kehutanan ekoregion Papua perlu di susun Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Pusat perlu menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/SET.1/07/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.4/SETJEN/ROCAN/SET.1/1/2022 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.
8. Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Nomor: SK.034/P3E.Papua/KBTU/REN.0.0/04/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Nomor SK.119/P3E.Papua/KBTU/10/2020 tentang Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Memutuskan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TENTANG RENCANA KERJA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA TAHUN 2024

KESATU : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 digunakan sebagai acuan dalam :

1. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran unit kerja pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2024
2. Pengendalian Program dan Kegiatan pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2024

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Biak
Pada tanggal : November 2023

KEPALA PUSAT

Edward Sembiring, S.Hut., M.Si
NIP. 197305301999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

Adaptasi pelaksanaan pengendalian pembangunan ekoregion Papua terhadap perubahan penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan KLHK dalam rangka internalisasi Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 15 Tahun 2021 terus dilakukan. Pengesahan Undang-Undang tentang pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, dari 2 provinsi menjadi 6 provinsi menjadi tantangan bagi P3E Papua dalam meningkatkan pengendalian pembangunan ditingkat tapak. Tantangan-tantangan tersebut membutuhkan semangat yang besar yang akan terus dibangun demi mendukung pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang berkelanjutan.

Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua melaksanakan tugas pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion dan bertanggung jawab

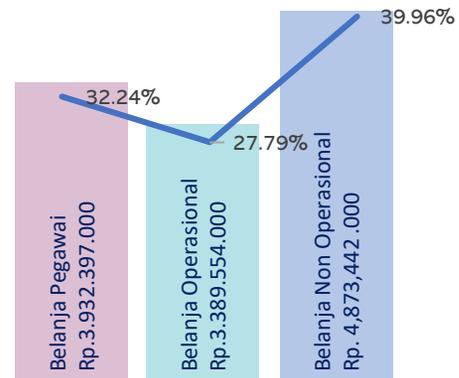
langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal. Tahun 2024 merupakan tahun kedua penyesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pengendalian pembangunan ekoregion Papua perlu dilakukan untuk menjawab tantangan pengendalian pembangunan di Papua, juga untuk mendukung terciptanya tata pemerintahan yang baik melalui peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi.

Kegiatan pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024, tercantum sasaran kegiatan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua 'Meningkatnya Pengendalian Pembangunan

Lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Papua. Penambahan indikator kegiatan dari 2 indikator kegiatan di tahun 2023 menjadi 4 indikator kegiatan di tahun 2024 menunjukkan bertambahnya tugas dan tanggung jawab P3E Papua. 4 indikator kegiatan yang akan dicapai, yaitu (1) Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E sebesar **4 poin** dan (2) Jumlah Pemda yang di fasilitasi dan di bina di wilayah ecoregion sebanyak **8 Pemda**, (3) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker P3E Papua sebagai pembentuk NKA Setjen (baseline 2022: 95.68) sebesar **98.78 Poin**, dan (4) Evaluasi Nilai Sakip P3E Papua sebesar **80 poin**. Tahun 2024 kegiatan pengendalian pembangunan LHK di ekoregion Papua di fasilitasi pagu anggaran sebesar Rp.12.195.393.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni. Alokasi anggaran di bagi menjadi Belanja Opeasional untuk penunjang kerja sebesar Rp.3.389.554.000,- dan Belanja Non

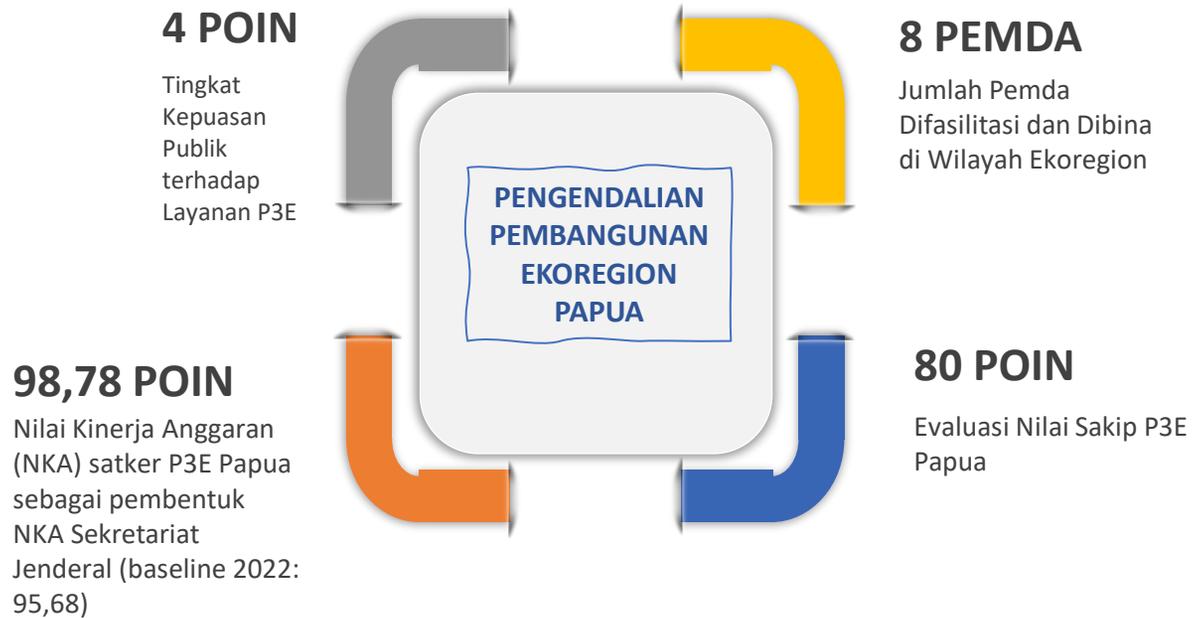
Operasional untuk pencapaian target kinerja sebesar Rp.4.873.442.000,-

Pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2024 di fokusnya pada 4 isu, yaitu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.



Pagu Anggaran Tahun 2024

INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Sasaran Rencana Strategis Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2020-2024, yaitu ‘Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Papua’, dengan Indikator kinerja kegiatan yaitu (1). Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E dan (2) Jumlah Pemda yang di fasilitasi dan di bina di wilayah ekoregion, (3) NKA satker P3E Papua sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022: 95.68) dan Evaluasi Nilai Sakip P3E Papua.

Rencana strategis tersebut didetailkan dalam rencana kerja yang menggambarkan kinerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Pada tahun 2024 ini, adalah tahun kedua dalam adaptasi pelaksanaan kegiatan terhadap perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan No 15 tahun 2021. Kegiatan pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dan Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

Penyusunan rencana kerja P3E Papua tahun 2024 menjadi arahan pelaksanaan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dengan tugas penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan di wilayah ekoregion; Fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion serta melaksanakan Evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion dengan tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Perencanaan kerja yang akurat dan sistematis mempermudah mencapai tujuan organisasi dengan harapan reformasi birokrasi dan layanan publik yang handal menghantarkan kita menuju sebuah transformasi ekonomi menyongsong Papua yang semakin maju, dan mengakomodir daerah otonomi baru yang telah ditetapkan dengan undang-undang dengan harapan “Mengakselerasi transformasi birokrasi yang berdampak untuk transformasi ekonomi dan lingkungan”, sesuai tema pembangunan KLHK.

Optimalisasi kinerja Pusat pengendalian pembangunan ekoregion Papua dilakukan dengan mengorientasikan kinerja kepada *outcome* yang berdampak jangka panjang hingga ke tingkat tapak dan bukan lagi kepada *output* dengan hasil jangka pendek. Selain optimal dalam kinerja, tata kelola perencanaan dan penganggaran dilakukan dengan kerangka *Value for Money* agar anggaran dapat terserap sempurna dan setiap pengeluaran bisa tepat sasaran.

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas tersusunnya dokumen rencana kerja ini dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan memberkati dan meridhoi kerja ikhlas kita semua.

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion Papua

The image shows a circular official stamp of the Center for Environmental Control and Development of the Papua Ecoregion. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA' and 'PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature.

Edward Sembiring, S.Hut., M.Si

DAFTAR ISI

1	PENDAHULUAN	1
2	CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS	8
3	RENCANA KERJA	42
4	PENUTUP	57



01

PENDAHULUAN

Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Papua merupakan dokumen perencanaan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Satker sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja menjembatani antara perencanaan pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dengan Renja Sekretariat Jenderal, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMN). Renja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis, yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dan pengusulan program/ kegiatan yang akan dibiayai oleh APBN.

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasal 652, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua merupakan unsur

pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretariat Jenderal. Pada Pasal 654 dijelaskan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion, selanjutnya pada Pasal 655 di jelaskan untuk melaksanakan tugas ebagaimana dimaksud dalam Psasal 652 dan Pasal 653 Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. Koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. Koordinasi pelaksanaan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan

- f. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua didukung oleh 1 (satu) Bagian dan 3 (tiga) Bidang yang masing-masing membawahi 1 Sub Bidang.

Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program, verifikasi pelaksanaan program lingkungan hidup dan kehutanan, kerjasama, pengelolaan urusan tata usaha, pengelolaan keuangan, kepegawaian, sistem pengawasan intern, reformasi birokrasi, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara serta pelaporan kinerja, rumah tangga, kearsipan dan dokumentasi. Bagian Tata Usaha terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan

kehutanan di wilayah ekoregion. Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan perencanaan koordinasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;

- e. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- f. pelaksanaan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang integrasi rencana pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Subbidang Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan persiapan bahan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion. Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan persiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion;
- c. pelaksanaan pengelolaan laboratorium lingkungan di wilayah ekoregion; dan
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, limbah, dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Subbidang Fasilitasi Penerapan Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun di wilayah ekoregion.

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion. Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion terdiri atas Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion menyelenggarakan fungsi:

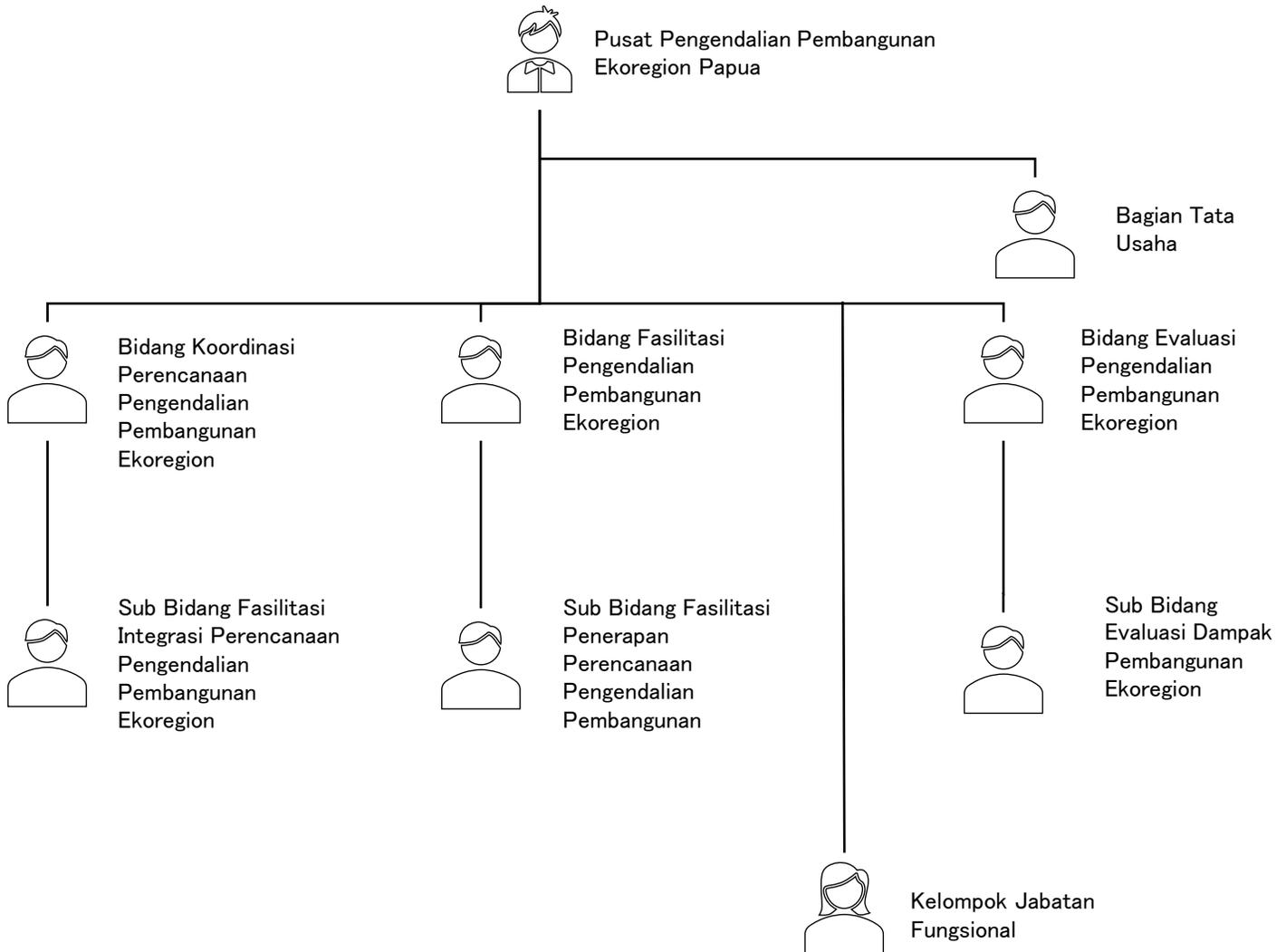
- a. perencanaan evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- b. pelaksanaan evaluasi penerapan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di

wilayah ekoregion;

- c. pelaksanaan identifikasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion;
- d. penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion; dan
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang evaluasi pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

Subbidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan identifikasi dampak, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion.

STRUKTUR ORGANISASI



SUMBER DAYA MANUSIA

Faktor penting dalam mendukung perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja adalah sumber daya manusia yang profesional. Pegawai pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2023 sebanyak 38 orang, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 76,32 % atau 29 orang dan perempuan sebanyak 23,67 % atau 9 orang.



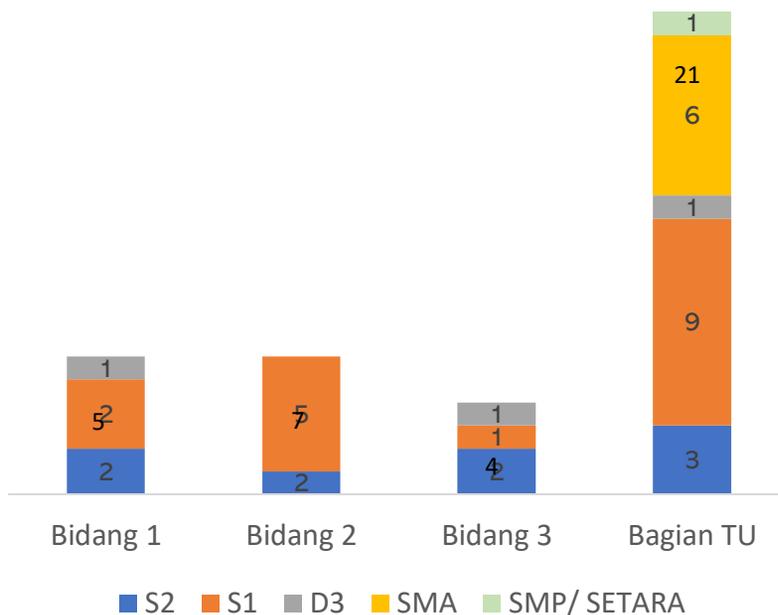
76,32 %
Jumlah pegawai Laki-laki = 29 orang

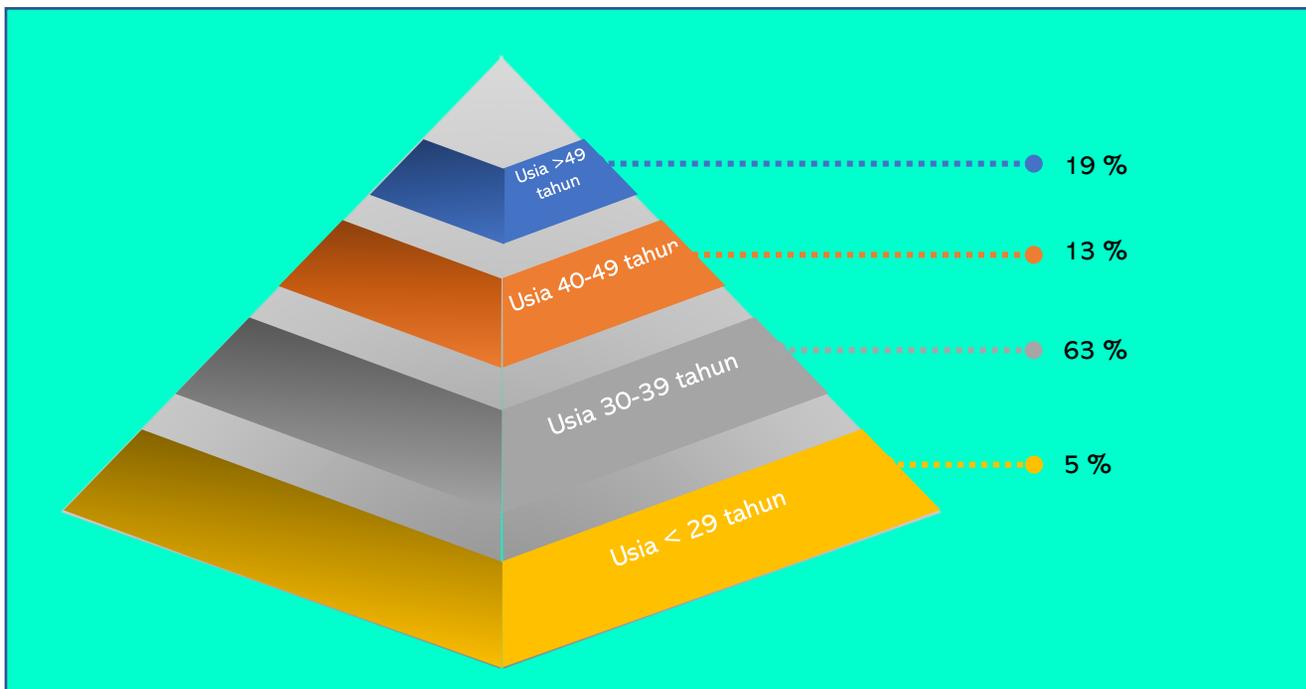


23,67 %
Jumlah pegawai Perempuan = 9 orang

Dari total 38 pegawai 19 orang merupakan lulusan Sarjana (S1), 9 orang adalah lulusan Magister (S2), 6 orang lulusan SMA, 3 orang lulusan D3 dan 1 orang lulusan SMP/ Sederajat. Dari total 38 pegawai sebanyak 28 orang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), 2 orang PPNPN dan 8 orang Pegawai *Outsourcing*.

Distribusi pegawai pada P3E Papua yaitu sebanyak 6 orang pada Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, sebanyak 7 orang pada Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion, sebanyak 4 orang pada Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion dan sebanyak 21 orang pada Bagian Tata Usaha.





Piramida sumber daya manusia di P3E Papua menunjukkan kelompok interval usia pegawai sepuluh tahunan. Dasar grafik piramida adalah usia termuda dan semakin tua ke atas. Struktur pegawai P3E Papua baik ASN maupun Non ASN diketahui mayoritas adalah pegawai dengan rentang usia 30-39 tahun sebanyak 24 orang, disusul oleh pegawai dengan

rentang usia < 29 tahun sebanyak 2 orang, dan pegawai dengan rentang usia 40-49 tahun sebanyak 5 orang dan rentang usia > 49 tahun masing-masing sebanyak 7 orang. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa pegawai P3E Papua di dominasi oleh pegawai dengan rentang usia 30-39 tahun, cenderung produktif, kreatif dan penuh semangat dalam bekerja.



02

CAPAIAN DAN PROGNOSIS

CAPAIAN INDIKATOR KEGIATAN TAHUN 2022

8 PEMDA (100%)

Layanan Korrdinasi
Perencanaan Pengendalian
Ekoregion

01

8 PEMDA (100%)

Layanan Pembinaan dan
Penerapan PPKL, PSLB3 di
wilayah Ekoregion

03

02

04

8 DAERAH (100%)

Layanan Evaluasi
Pengendalian Pembangunan
Ekoregion

3.34 POIN (Skala
Likert 1-4)
(83.50 %)

Tingkat Kepuasan Publik
Terhadap Layanan P3E

Pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion Papua tahun 2022 di laksanakan di delapan (8) daerah (*in line*) yaitu:

(1) Kota Sorong, (2) Kabupaten Sorong, (3) Kabupaten Sorong Selatan, (4) Kabupaten Manokwari, (5) Kota Jayapura, (6) Kabupaten Jayapura, (7) Kabupaten Merauke, dan (8) Kabupaten Boven Digoel.

IKK 1. LAYANAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION



Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilakukan dengan memberikan fasilitas integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion melalui tahapan kegiatan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, analisis data dan informasi PPE, sinkronisasi perencanaan PPE dan fasilitasi integrasi perencanaan PPE.

Kegiatan layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion yang dilaksanakan adalah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan bidang LH, Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (kluster Sorong), Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (kluster Jayapura, FGD Isu Tematik (FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial). Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan UPT KLHK lingkup Provinsi Papua dan Papua Barat, Bappeda, Dinas LH dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilaksanakan dengan memperhatikan isu pokok perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, yaitu pencapaian target IKLH, penguatan regulasi perencanaan daerah Kabupaten/ Kota, percepatan program perhutanan sosial, dan implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan rumusan kegiatan yang akan menjadi rekomendasi bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya pengendalian pembangunan ekoregion secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Proses Bisnis P3E, tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dapat digambarkan seperti dalam bagan sebagai berikut.



Gambar Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Dalam tahapan inventarisasi perencanaan dilakukan pengumpulan dan pemilahan dokumen perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk jangka panjang, menengah ataupun pendek baik lingkup pusat, daerah maupun unit pelaksana teknis di daerah. Dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai database yang dapat diakses untuk tahapan perencanaan selanjutnya. Dari data dokumen perencanaan yang terkumpul kemudian dilakukan analisis atau telaah yang mencakup: Kesesuaian KRP (Pusat, Daerah, UPT); Kelengkapan instrumen LHK pada setiap dokumen perencanaan; Kecukupan dukungan anggaran, ada tidaknya duplikasi; serta Kesesuaian tata ruang antar perencanaan (analisis spasial). Hasil analisis yang dilakukan dituangkan dalam laporan hasil analisis yang memuat hal-hal tersebut.

Sinkronisasi adalah proses menyelaraskan dan memadukan beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam upaya pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Sedangkan integrasi adalah proses memasukkan atau menggabungkan suatu rencana kegiatan ke dalam beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan. Integrasi dilakukan dengan melalui rapat koordinasi, fasilitasi atau pendampingan yang melibatkan pakar (akademisi, praktisi, dll). Integrasi dilakukan dalam kerangka fasilitasi review (perbaikan) dokumen perencanaan yang ada sehingga diperoleh sebuah dokumen kesepakatan integrasi antar pihak.

IKK 2. LAYANAN PEMBINAAN DAN PENERAPAN PPKL, PSLB3 DI WILAYAH EKOREGION



Layanan pembinaan dan penerapan pengendalian pembangunan dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengendalian pembangunan ekoregion kepada Pemerintah Daerah. Layanan fasilitasi yang di berikan terdiri dari 4 layanan yaitu a) fasilitasi pengendalian

pencemaran lingkungan; b) fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan; c) fasilitasi pengelolaan sampah; dan d) fasilitasi pengelolaan Limbah B3. Capaian target Layanan Pembinaan dan Penerapan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion Papua sebanyak 8 daerah telah tercapai 100 persen.

- a) Fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan adalah mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi/ kabupaten/ kota di wilayah ekoregion Papua, sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota atau sesuai target IKLH pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.
- b) Fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan adalah meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sehingga dapat mendorong nilai IKLH. Fasilitasi yang diberikan dalam bentuk bimbingan teknis kepada daerah agar mampu mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c) Fasilitasi pengelolaan sampah; dan
Ruang lingkup pengelolaan sampah dibatasi pada upaya mendukung Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA). Hal ini selaras dengan sasaran strategis KLHK dalam mencapai target nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di tahun 2024 sebesar 70 poin (Rencana Strategis KLHK 2020-2024) serta

permasalahan peningkatan timbulan sampah di ekoregion Papua sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan. Kinerja pengelolaan sampah dikelompokkan menjadi kinerja pengurangan dan penanganan sampah. Kinerja pengurangan sampah dinilai dari kemampuan daerah untuk melakukan pembatasan timbulan sampah, daur-ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kinerja penanganan sampah dinilai dari kemampuan daerah dalam upaya pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

- d) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3
Ruang lingkup fasilitasi penerapan pengelolaan limbah dan B3 dibatasi pada upaya inventarisasi potensi timbulan limbah dan B3 serta sosialisasi peraturan terkini tentang limbah dan B3.

Matriks Layanan pembinaan penerapan PPKL, PSLB3 ditunjukkan sebagai berikut.

- a) Fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian pencemaran lingkungan adalah mendukung pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada provinsi/ kabupaten/ kota di wilayah ekoregion Papua, sesuai target yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD masing-masing provinsi/ kabupaten/ kota atau sesuai target IKLH pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/ 4/2021 tentang Penetapan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.
- b) Fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan;
Ruang lingkup fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan adalah meningkatkan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sehingga dapat mendorong nilai IKLH. Fasilitasi yang diberikan dalam bentuk bimbingan teknis kepada daerah agar mampu mengidentifikasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- c) Fasilitasi pengelolaan sampah; dan
Ruang lingkup pengelolaan sampah dibatasi pada upaya mendukung Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (JAKSTRADA). Hal ini selaras dengan sasaran strategis KLHK dalam

mencapai target nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) di tahun 2024 sebesar 70 poin (Rencana Strategis KLHK 2020-2024) serta permasalahan peningkatan timbulan sampah di ekoregion Papua sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk, ekonomi dan pembangunan. Kinerja pengelolaan sampah dikelompokkan menjadi kinerja pengurangan dan penanganan sampah. Kinerja pengurangan sampah dinilai dari kemampuan daerah untuk melakukan pembatasan timbulan sampah, daur-ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kinerja penanganan sampah dinilai dari kemampuan daerah dalam upaya pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.

d) Fasilitasi pengelolaan Limbah B3

Ruang lingkup fasilitasi penerapan pengelolaan limbah dan B3 dibatasi pada upaya inventarisasi potensi timbulan limbah dan B3 serta sosialisasi peraturan terkini tentang limbah dan B3.

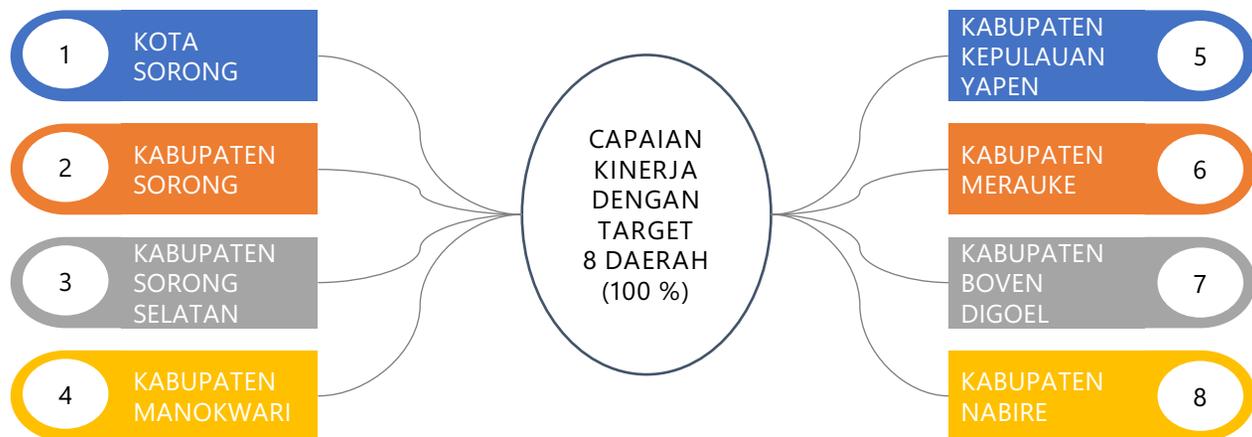
Matriks Layanan pembinaan penerapan PPKL, PSLB3 ditunjukkan sebagai berikut.

Matriks Layanan Pembinaan dan Penerapan PPKL, PSLB3 di Wilayah Ekoregion

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengendalian pencemaran wilayah ekoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PPKL, DKLH Provinsi Papua, DLHP Provinsi Papua Barat	
	Pembinaan laboratorium lingkungan daerah: • Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari
	Bimbingan teknis: • Bimbingan teknis pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas air di Kota Jayapura	Kota Jayapura
	Pemantauan lapangan dalam rangka penentuan titik koordinat/ titik pengambilan sampel air.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Mimika • Kota Jayapura • Kabupaten Sarmi • Kabupaten Supiori
	Pendampingan tata cara penginputan data IKLH pada link https://ppkl.menlhk.go.id/	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Jayapura • Kabupaten Teluk Wondama • Kabupaten Kaimana
Fasilitasi pengendalian kerusakan wilayah ekoregion	Koordinasi Satkeholder: Dijen PPKL, DLH Kabupaten Jayapura, DLH Kabupaten Sarmi, DLH Kabupaten Keerom, DLH Kabupaten Biak Numfor, DLH Kabupaten Merauke, Kota Jayapura	
Fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ekoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PSLB3, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.	
	Sosialisasi: • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Nabire • Kabupaten Keerom
	Supervisi/ Pemantauan lapangan: mengidentifikasi kondisi fisik pengelolaan sampah yang merupakan implementasi dari perencanaan daerah (Jakstrada) tentang pengelolaan sampah	

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengelolaan limbah B3	Koordinasi Stakeholder: Bimbingan teknis: <ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan teknis pengelolaan limbah medis di Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Jayapura

IKK 3. LAYANAN EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION



Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion terdiri dari 5 (lima) yaitu (a) evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ekoregion, (b) evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion, (c) evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ekoregion, (d) evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion dan (e)

evaluasi dampak pembangunan ekoregion

Capaian target layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2022 sebanyak 8 daerah telah tercapai 100 persen. Capaian layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua ditunjukkan sebagai berikut.

Matriks Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Kegiatan	Lokus
Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi titik pantau kualitas air di Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Manokwari Selatan 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Manokwari Kabupaten Manokwari Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi titik pantau kualitas air di Sorong Raya 	<ul style="list-style-type: none"> Kota Sorong Kabupaten Sorong Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Maybrat
Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi penyesuaian dokumen perencanaan Taman Nasional Wasur berbasis jasa lingkungan 	Kabupaten Merauke
Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penyesuaian Dokumen Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Boven Digoel 	Kabupaten Boven Digoel
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Perkembangan Penyusunan Dokumen Jakstrada Pengelolaan Sampah dan Integrasi Data Pengelolaan Sampah Dalam SIPSN Kabupaten Nabire 	Kabupaten Nabire
Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Penerapan Jakstrada dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Nabire 	Kabupaten Nabire
Evaluasi Penerapan Pengendalian Limbah B3 Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Yapen 	Kabupaten Kepulauan Yapen
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan 	Kabupaten Sorong Selatan
Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong Selatan 	Kabupaten Sorong Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Identifikasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Sorong 	Kabupaten Sorong

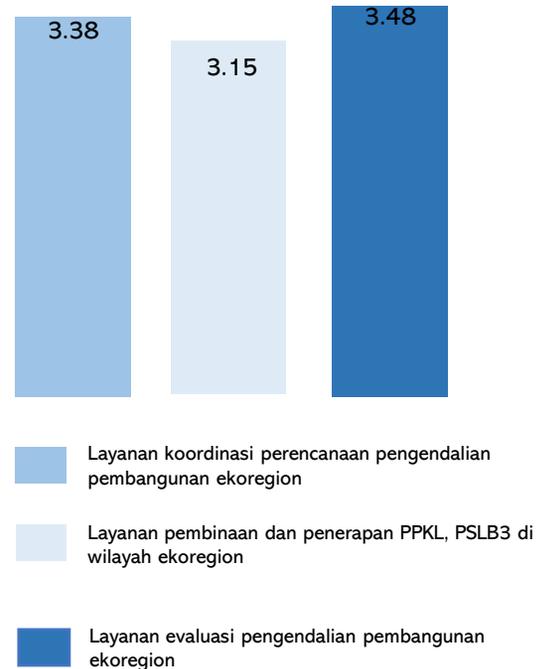
IKK 4. SURVEY KEPUASAN PUBLIK TERHADAP LAYANAN P3E PAPUA

Survey kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua tahun 2022 adalah 3.34 Poin atau 83.50 %. Nilai tersebut diperoleh dari metode analisa perhitungan dengan menggunakan skala likert 1-4. Apabila nilai tersebut di konversi ke dalam skala likert 1-5 maka di dapatkan nilai survey kepuasan layanan publik terhadap P3E Papua sebesar 4.18 Poin. Dengan demikian capaian Indikator kinerja kegiatan sebesar 104.5%.

Bentuk layanan survey kepuasan publik yang dilakukan terdiri dari 3 yaitu:

1. Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion;
2. Layanan pembinaan dan penerapan pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
3. Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion.

Survey kepuasan publik dilaksanakan pada 18 kegiatan dengan responden sebanyak 406, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Daerah, UPT KLHK, dan kelompok paguyuban yang menerima layanan P3E Papua. Perbaikan pelayanan pada layanan pembinaan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion dengan nilai



Gambar Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Papua Tahun 2022

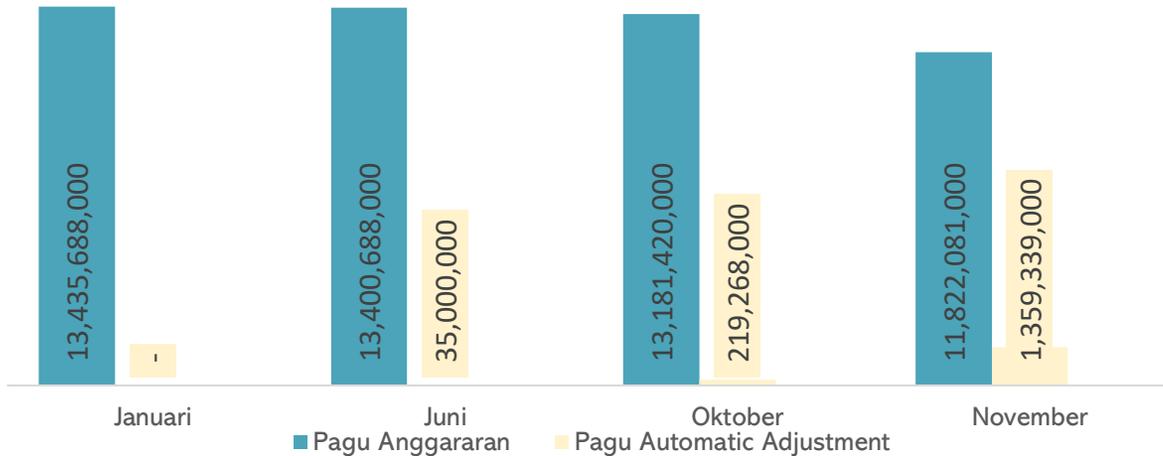
terendah menjadi salah satu prioritas untuk menjaga performa kualitas pelayanan publik P3E Papua.

Rincian hasil survei kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua Tahun 2022 di tunjukkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel Hasil Survey Kepuasan Publik Terhadap Layanan P3E Papua Tahun 2023

No.	Judul Kegiatan	Jumlah Responden	Nilai SKP Skala 1-4
A	Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion		
1	Rapat koordinasi dalam rangka inventarisasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK	20	4.00
2	FGD pembahasan isu strategis dan sinkronisasi perencanaan bidang LHK di ekoregion Papua	17	3.25
3	Inventarisasi perencanaan bidang LHK dalam rangka pengendalian pembangunan di Kota Sorong	17	3.09
4	Inventarisasi perencanaan bidang LHK dalam rangka pengendalian pembangunan di Kota Jayapura	20	3.10
5	FGD Perencanaan pembangunan bidang LHK dalam mendukung pencapaian target Indonesia, s FOLU Net Sink 2030 di wilayah ekoregion Papua di Kota Sorong	25	3.56
6	Fasilitasi integrasi perencanaan pembangunan bidang LHK di Ekoregion Papua	21	3.27
	Total	120	3.38
B	Layanan pembinaan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion		
1	Bimbingan teknis pengolahan limbah medis di Kota Jayapura	26	3.22
2	Pendampingan pengurangan sampah di Kabupaten Keerom	20	2.94
3	Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium Provinsi Papua Barat	20	3.11
4	Pemantauan lapangan dan pendampingan daerah dalam rangka pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di wilayah ekoregion papua	15	3.20
5	Bimbingan teknis pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas air di Kota Jayapura	17	3.30
	Total	98	3.15
C	Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua		
1	Monitoring evaluasi perkembangan penyusunan dokumen Jakstrada pengelolaan sampah dan integrasi data pengelolaan sampah dalam SIPSN Kabupaten Nabire	25	3.96
2	Evaluasi penyesuaian dokumen perencanaan TN. Wasur berbasis jasa lingkungan di Kabupaten Merauke	30	3.33
3	Evaluasi penyesuaian dokumen perencanaan pengelolaan Sumber daya hutan di Kabupaten Boven Digoel	30	3.41
4	Pertemuan monitoring dan identifikasi dampak pembangunan LHK di Kabupaten Sorong Selatan	17	3.61
5	Pertemuan monitoring dan identifikasi dampak pembangunan LHK di Kabupaten Sorong	26	3.15
6	Monitoring dan evaluasi pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Yapen	26	3.50
7	Pertemuan monitoring evaluasi penerapan jakstrada dan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire.	34	3.42
	Total	188	3.48
	Total Responden dan Nilai Survey Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Papua	406	3.34

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN



Gambar Perkembangan Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022

Pagu awal anggaran P3E Papua tahun 2022 bersumber dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp. 13.435.688.000,- (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada tahun 2022 perubahan pagu anggaran P3E Papua terjadi sebanyak 3 (tiga) kali, disebabkan adanya refocusing anggaran dalam rangka mitigasi dampak berkelanjutan dan memburuknya pandemic covid-19. Perubahan anggaran dengan mekanisme blokir pencadangan anggaran (*Automatic Adjustment*) dilakukan sesuai Memoradum Sekretaris Jenderal Nomor M.25/SETJEN/ROCAN/SET.1/12/2021 tanggal 07 Desember 2021. Perubahan lainnya di gunakan

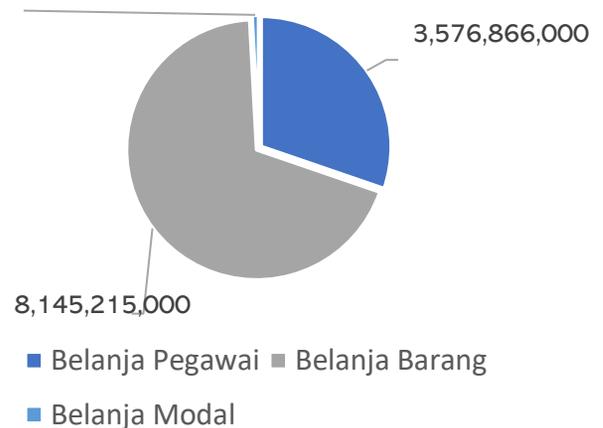
untuk memenuhi kebutuhan operasional pimpinan. Total refocusing anggaran sebesar Rp. 1.613.607.000,- atau 12.01 persen dari pagu awal, bersumber dari belanja pegawai sebesar Rp. 219.268.000,- dan belanja barang sebesar Rp. 1.394.339.000,- sehingga pagu akhir anggaran P3E Papua Rp.11.822.081.000,-. Perubahan anggaran diawali pada bulan juni sebesar 35.000.000,- dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan operasional pimpinan, dilanjutkan pada bulan oktober sebesar Rp.689.807.000,- dan bulan November sebesar Rp. 888.800.000,- untuk mitigasi dampak berkelanjutan dan memburuknya pandemic covid-19.

Tabel Revisi Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Awal	Revisi Pemenuhan Anggaran Pimpinan	Revisi AA Tahap I	Revisi AA Tahap II	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	3,796,134,000		219,268,000		3,576,866,000
Belanja Barang	9,539,554,000	35,000,000	470,539,000	888,800,000	8,145,215,000
Belanja Modal	100,000,000	0	0	0	100,000,000
Jumlah	13,435,688,000	35,000,000	689,807,000	888,800,000	11,822,081,000

Alokasi anggaran berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp.3.576.866.000 atau 30.26 persen, belanja barang sebesar Rp.8.145.215.000 atau 68.90 persen dan belanja modal sebesar Rp.100.000.000 atau 0.85 persen.

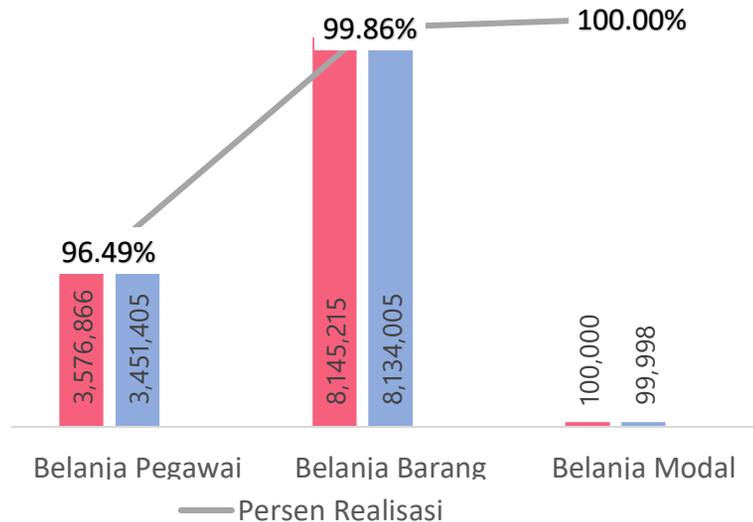
Alokasi anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada bidang dan Bagian yaitu Bagian Tata Usaha sebesar Rp.8.122.081.000 atau 68.70 persen, Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.231.376.000 atau 10.42 persen, Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.179.658.000 atau 9.98 persen, dan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.288.966.000,- atau 10.90 persen.



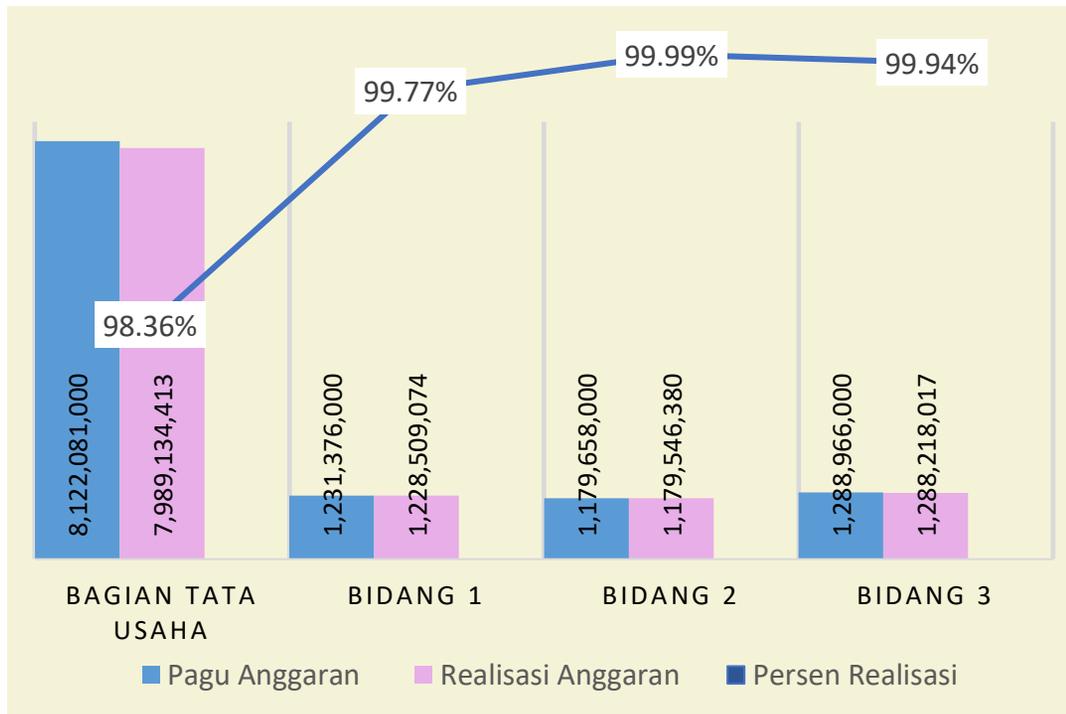
Gambar Alokasi Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022

Realisasi anggaran sebesar Rp. 11.685.407.884 atau 98.84 persen, dengan rincian realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.3.451.405.000 atau 96.49 persen, realisasi belanja barang sebesar Rp.8.134.005.000 atau 99.86 persen dan realisasi belanja modal sebesar Rp.99.998.000 atau 100 persen.

Realisasi anggaran pada Bagian Tata Usaha sebesar Rp.7.989.134.413 atau 98.36 persen, realisasi anggaran pada Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.228.509.074,- atau 99.77 persen, realisasi Bidang Fasilitas Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.179.546.380 atau 99.99 persen, dan realisasi Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion sebesar Rp.1.288.218.017 atau 99.94 persen.



Gambar Realisasi Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022
(x Rp.1000.000)



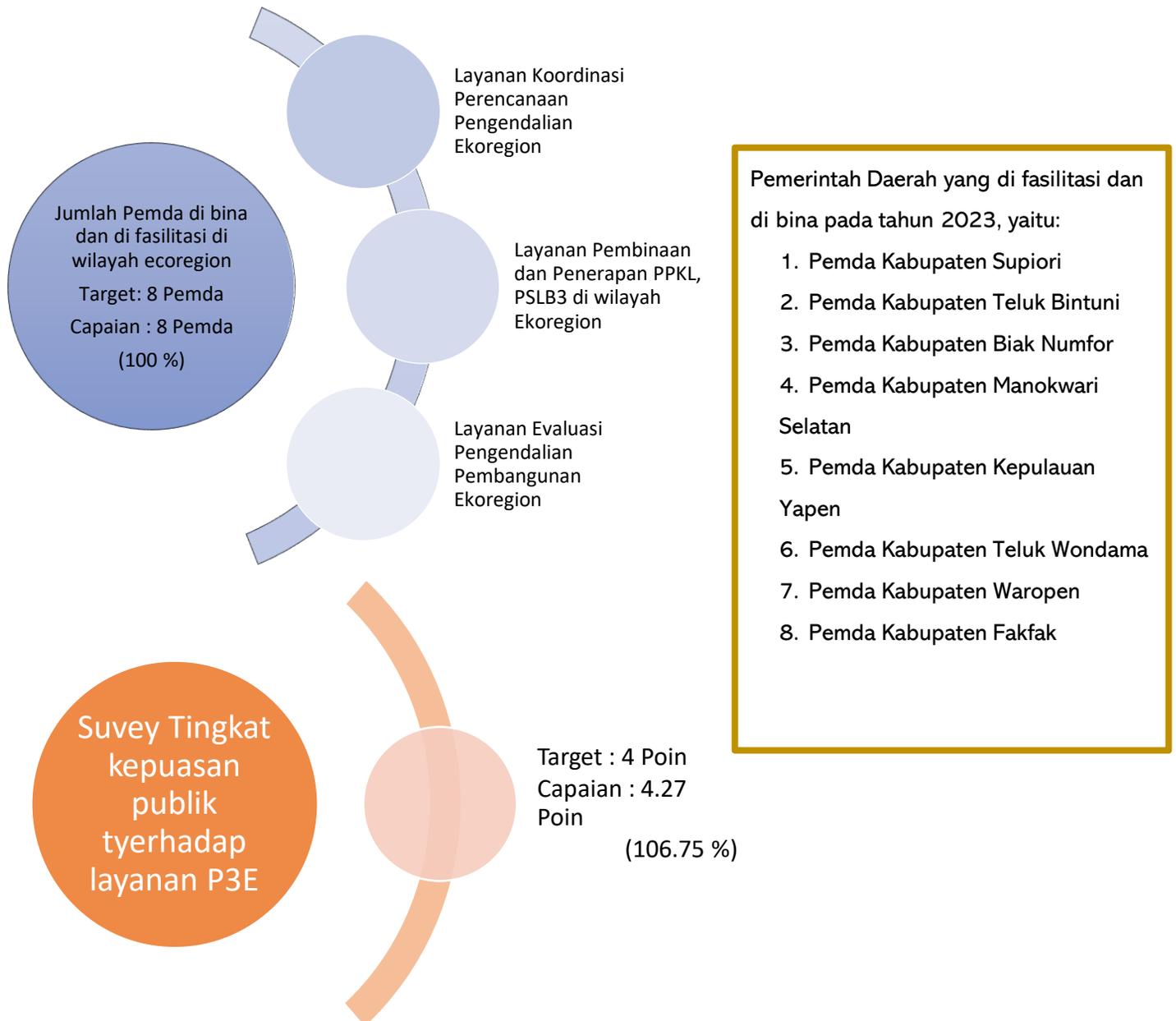
Ket:

Bidang 1: Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang 2: Bidang Fasilitasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Bidang 3: Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

PROGNOSIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023



Pusat Pengendalian Pembangunan adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal.

P3E Papua mendukung tercapainya target kinerja Sekretariat Jenderal. Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi disebutkan terdapat perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga di lingkup Sekretariat Jenderal. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

dan mulai berlaku pada pemerintahan tahun 2023.

Tahun 2023 diberlakukan 13 Sasaran Stragegis (SS) KLHK dimana Sekretariat Jenderal akan mendukung Sasaran Strategis ke 13 yaitu “Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien”. Indikator Kinerja Program adalah Nilai Reformasi Birokrasi.

P3E Papua melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan LHK pada wilayah ekoregion dengan sasaran kegiatan meningkatnya pengendalian pembangunan LHK ekoregion Papua dan indikator kinerja kegiatan tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E dan Jumlah pemda di bina dan difasilitasi di wilayah ekoregion. Target kinerja tahun 2023 ditunjukkan sebagai berikut.

TARGET KINERJA TAHUN 2023

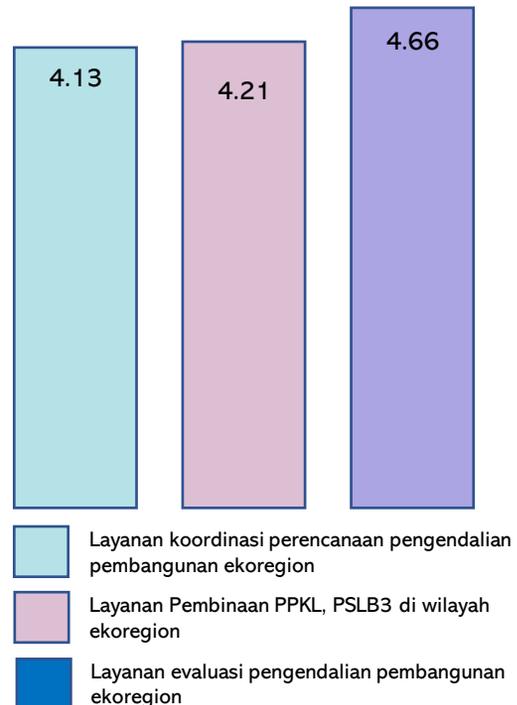
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E	4	Poin
		Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	8	Daerah

Indikator Kegiatan 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E

Survey tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua tahun 2023 di laksanakan selama 12 bulan pada 19 kegiatan. Teknik survey menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan (kuisisioner) yang diberikan kepada 594 orang responden. Survey dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap layanan yang diberikan P3E Papua. Layanan dimaksud terdiri dari 3 (tiga), yaitu Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion dan Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion.

Target tingkat kepuasan kepuasan publik terhadap layanan P3E adalah 4 Poin, capaian tahun 2023 adalah 4.27 poin atau 106.75 persen.

Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E Papua sebesar 4.27 menunjukkan pengguna layanan P3E Papua sangat puas dengan kualitas pelayanan yang diberikan.



4.27

Tingkat kepuasan layanan P3E

Indikator Kegiatan 2. Jumlah Pemda Difasilitasi dan Dibina di Wilayah Ekoregion

Fasilitasi dan pembinaan pengendalian Pembangunan di wilayah ecoregion Papua di berikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk 3 layanan, yaitu:

1. Layanan perencanaan pengendalian pembangunan di wilayah ecoregion
2. Layanan pembinaan dan penerapan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion
3. Layanan evaluasi pengendalian Pembangunan ecoregion.

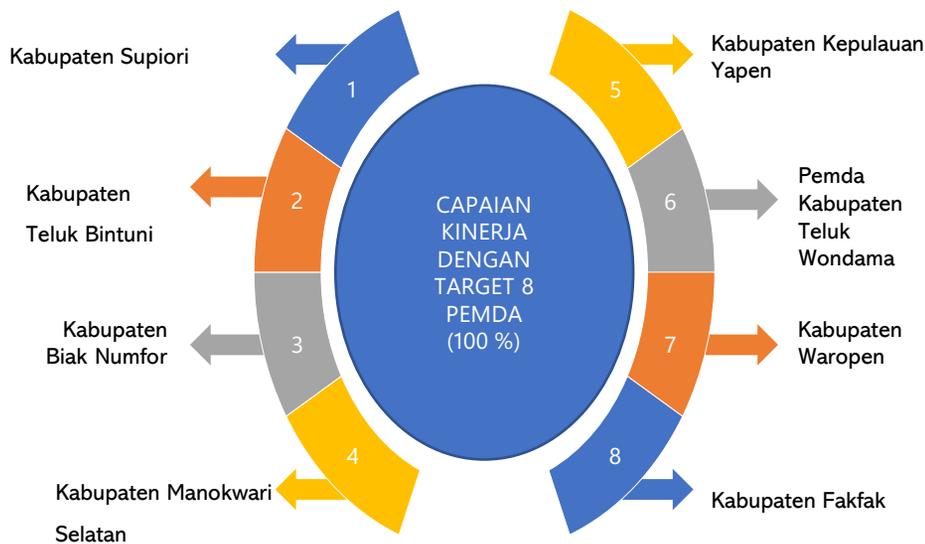
Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengendalian Pembangunan di wilayah ecoregion Papua termuat dalam Rencana Strategis P3E Papua Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagai bentuk penyesuaian tugas dan fungsi P3E di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan Pemerintah Daerah. Jumlah Pemerintah Daerah yang telah di fasilitasi dan di

bina sampai dengan tahun 2023 sebanyak 16 Pemerintah Daerah. Target sampai sampai dengan tahun 2024 sebanyak 24 Pemerintah Daerah.

TAHUN 2022	TAHUN 2023
<ol style="list-style-type: none">1. Kota Sorong2. Kabupaten Sorong3. Kabupaten Sorong Selatan4. Kabupaten Raja Ampat5. Kota Jayapura6. Kabupaten Jayapura7. Kabupaten Sorong8. Kabupaten Sarmi	<ol style="list-style-type: none">1. Pemda Kabupaten Supiori2. Pemda Kabupaten Teluk Bintuni3. Pemda Kabupaten Biak Numfor4. Pemda Kabupaten Manokwari Selatan5. Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen6. Pemda Kabupaten Teluk Wondama7. Pemda Kabupaten Waropen8. Pemda Kabupaten Fakfak

LAYANAN KOORDINASI PERENCANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION



Layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilakukan dengan memberikan fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion melalui tahapan kegiatan inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, analisis data dan informasi PPE, sinkronisasi perencanaan PPE dan fasilitasi integrasi perencanaan PPE.

Kegiatan layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion yang dilaksanakan adalah Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan bidang LH, Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (kluster Sorong), Inventarisasi perencanaan bidang lingkungan hidup dan kehutanan (kluster Jayapura, FGD Isu Tematik (FOLU Net Sink 2030 dan Perhutanan Sosial). Kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan UPT KLHK lingkup Provinsi Papua dan Papua Barat, Bappeda, Dinas LH dan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion dilaksanakan dengan memperhatikan isu pokok perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion, yaitu pencapaian target IKLH, penguatan regulasi perencanaan daerah Kabupaten/ Kota, percepatan program perhutanan sosial, dan implementasi Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030. Kegiatan yang telah dilaksanakan menghasilkan rumusan kegiatan yang akan menjadi rekomendasi bagi seluruh pihak terkait untuk meningkatkan upaya pengendalian pembangunan ekoregion secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Proses Bisnis P3E, tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion dapat digambarkan seperti dalam bagan sebagai berikut.



Gambar Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembnagunan Ekoregion

Dalam tahapan inventarisasi perencanaan dilakukan pengumpulan dan pemilahan dokumen perencanaan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan untuk jangka panjang, menengah ataupun pendek baik lingkup pusat, daerah maupun unit pelaksana teknis di daerah. Dokumen tersebut kemudian dijadikan sebagai database yang dapat diakses untuk tahapan perencanaan selanjutnya.

Dari data dokumen perencanaan yang terkumpul kemudian dilakukan analisis atau telaah yang mencakup: Kesesuaian KRP (Pusat, Daerah, UPT); Kelengkapan instrumen LHK pada setiap dokumen perencanaan; Kecukupan dukungan anggaran, ada tidaknya duplikasi; serta Kesesuaian tata ruang antar perencanaan (analisis spasial). Hasil analisis yang dilakukan dituangkan dalam

laporan hasil analisis yang memuat hal-hal tersebut.

Sinkronisasi adalah proses menyelaraskan dan memadukan beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait dalam upaya pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Sedangkan integrasi adalah proses memasukkan atau menggabungkan suatu rencana kegiatan ke dalam beberapa dokumen perencanaan yang saling terkait untuk memperkuat pencapaian sasaran pembangunan. Integrasi dilakukan dengan melalui rapat koordinasi, fasilitasi atau pendampingan yang melibatkan pakar (akademisi, praktisi, dll). Integrasi dilakukan dalam kerangka fasilitasi review (perbaikan) dokumen perencanaan yang ada sehingga diperoleh sebuah dokumen kesepakatan integrasi antar pihak.

KENDALA

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2023:

- 1) Lokus kegiatan yang menyebar dan keterbatasan pembiayaan kegiatan, sehingga tahapan kegiatan dalam proses bisnis koordinasi perencanaan belum dilaksanakan secara optimal;
- 2) Adanya perubahan kegiatan atau pelaksanaan kegiatan di luar lokus yang tidak mendukung output kegiatan perencanaan;
- 3) Belum sinergisnya kegiatan Koordinasi Perencanaan Koordinasi Perencanaan dengan kegiatan teknis dan kegiatan pendukung lainnya;
- 4) Kurangnya keterlibatan OPD terkait dalam kegiatan koordinasi perencanaan (sinkronisasi dan fasilitasi integrasi) karena lokus kegiatan yang menyebar;
- 5) Kurangnya keterlibatan Pakar/Tenaga Ahli dalam pembahasan dan perumusan masalah dan isu strategis pembangunan LHK;
- 6) Rekomendasi dan hasil analisis isu strategis kegiatan Koordinasi Perencanaan/Fasilitasi Integrasi belum menjadi arahan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan Layanan Koordinasi Perencanaan dan pencapaian output kegiatan yang optimal, hal-hal yang perlu dilakukan:

- 1) Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai proses bisnis Koordinasi Perencanaan secara konsisten untuk pencapaian output kegiatan, sehingga perlu ditetapkan mekanisme implementasi kegiatan;
- 2) Perlunya sinergitas antara kegiatan teknis dan kegiatan pendukung lainnya dalam pelaksanaan Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
- 3) Perlunya kolaborasi dengan pihak eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi Perencanaan/Fasilitasi Integrasi Perencanaan Pembangunan LHK;
- 4) Melakukan evaluasi terhadap penetapan target capaian output (8 lokus), untuk efektifitas Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion di wilayah ekoregion Papua.

LAYANAN PEMBINAAN DAN PENERAPAN PPKL, PSLB3 DI WILAYAH EKOREGION

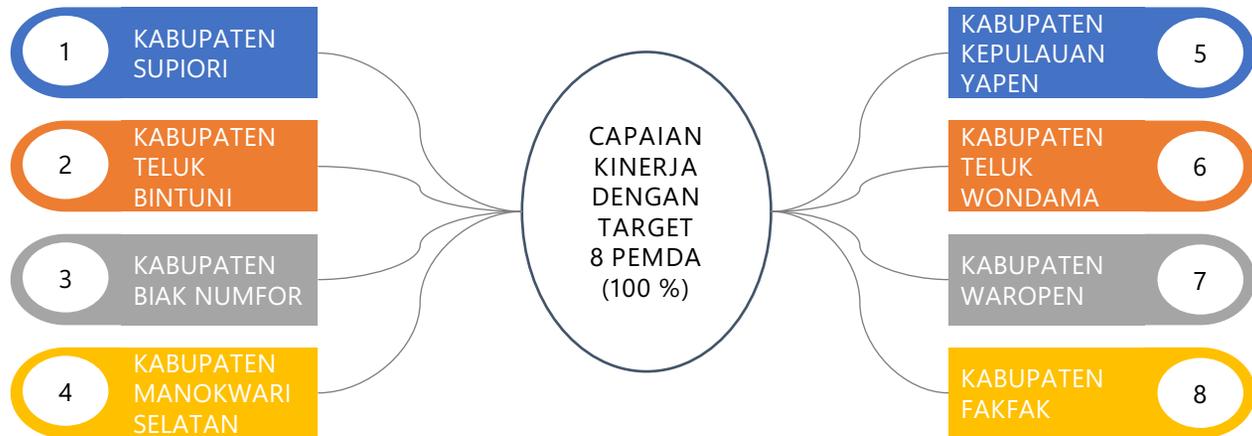


Layanan pembinaan dan penerapan pengendalian pembangunan dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun dilakukan dengan memberikan fasilitasi pengendalian pembangunan ekoregion kepada Pemerintah Daerah. Layanan fasilitasi yang di berikan terdiri dari 4 layanan yaitu a) fasilitasi

pengendalian pencemaran lingkungan; b) fasilitasi pengendalian kerusakan lingkungan; c) fasilitasi pengelolaan sampah; dan d) fasilitasi pengelolaan Limbah B3. Capaian target Layanan Pembinaan dan Penerapan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion Papua sebanyak 8 Pemda telah tercapai 100 persen.

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengendalian pencemaran wilayah ekoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PPKL, DKLH Provinsi Papua, DLHP Provinsi Papua Barat	
	Pembinaan laboratorium lingkungan daerah: • Bimbingan teknis pengelolaan laboratorium lingkungan Provinsi Papua Barat di Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari
	Bimbingan teknis: • Bimbingan teknis pengambilan dan pengujian sampel parameter kualitas air di Kota Jayapura	Kota Jayapura
	Pemantauan lapangan dalam rangka penentuan titik koordinat/ titik pengambilan sampel air.	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Mimika • Kota Jayapura • Kabupaten Sarmi • Kabupaten Supiori
Fasilitasi pengendalian kerusakan wilayah ekoregion	Pendampingan tata cara penginputan data IKLH pada link https://ppkl.menlhk.go.id/	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Jayapura • Kabupaten Teluk Wondama • Kabupaten Kaimana
	Koordinasi Satkeholder: Dijen PPKL, DLH Kabupaten Jayapura, DLH Kabupaten Sarmi, DLH Kabupaten Keerom, DLH Kabupaten Biak Numfor, DLH Kabupaten Merauke, Kota Jayapura	
Fasilitasi pengelolaan sampah wilayah ekoregion	Koordinasi Stakeholder: Dirjen PSLB3, Dinas Kehutanan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat.	
	Sosialisasi: • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Nabire • Pendampingan pengelolaan sampah di Kabupaten Keerom	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Nabire • Kabupaten Keerom
	Supervisi/ Pemantauan lapangan: mengidentifikasi kondisi fisik pengelolaan sampah yang merupakan implementasi dari perencanaan daerah (Jakstrada) tentang pengelolaan sampah	

LAYANAN EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION



Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion terdiri dari 5 (lima) yaitu (a) evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ekoregion, (b) evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion, (c) evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ekoregion, (d) evaluasi penerapan

pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion dan (e) evaluasi dampak pembangunan ekoregion

Capaian target layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2022 sebanyak 8 Pemda telah tercapai 100 persen. Capaian layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua ditunjukkan sebagai berikut.

Matriks Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	Kegiatan	Lokus
Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ecoregion di Kabupaten Waropen 	<ul style="list-style-type: none"> Kabupaten Waropen
Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ecoregion di Kabupaten Fakfak 	Kabupaten Fakfak
Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan sampah di Kabupaten Supiori Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan sampah di Kabupaten Manokwari Selatan 	Kabupaten Supiori
Evaluasi Penerapan Pengendalian Limbah B3 Wilayah Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 di Kota Jayapura Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan limbah medis di Kabupaten Teluk Bintuni 	Kota Jayapura
	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan limbah medis di Kabupaten Biak Numfor 	Kabupaten Biak Numfor
Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Yapen 	Kabupaten Kepulauan Yapen

Layanan Pembinaan PPKL, PSLB3 di Ekoregion Papua	Kegiatan	Lokus
Fasilitasi pengelolaan limbah B3	Koordinasi Stakeholder: Bimbingan teknis: • Bimbingan teknis pengelolaan limbah medis di Jayapura	• Kota Jayapura

**Indikator 3. Layanan Evaluasi Pengendalian
Pembangunan Ekoregion**

Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion terdiri dari 5 (lima) yaitu (a) evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ekoregion, (b) evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion, (c) evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ekoregion, (d) evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3 wilayah ekoregion dan (e) evaluasi dampak pembangunan ekoregion

Capaian target layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua tahun 2022 sebanyak 8 daerah telah tercapai 100 persen, yaitu

1. Kota Sorong
2. Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Sorong Selatan
4. Kabupaten Manokwari
5. Kabupaten Kepulauan Yapen
6. Kabupaten Merauke
7. Kabupaten Nabire
8. Kabupaten Boven Digoel

Matriks capaian layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion Papua ditunjukkan sebagai berikut.

ARAHAN DAN REKOMENDASI

Kabupaten Waropen

1. Pemerintah Kabupaten Waropen perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan;
2. Pemerintah Kabupaten Waropen perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup;
3. Pemerintah Kabupaten Waropen perlu meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengendalian pencemaran lingkungan;
4. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap aktivitas industri yang berpotensi mencemari air dan udara
5. Memperkuat kerjasama antara pemerintah daerah, sektor industri, dan masyarakat dalam mengurangi dampak pencemaran.

Kabupaten Fakfak

1. Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku kerusakan wilayah;
2. Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah;
3. Pemerintah Kabupaten Fakfak perlu meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengendalian kerusakan wilayah;
4. Menyusun rencana rehabilitasi lahan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan;
5. Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian ekosistem local.

ARAHAN DAN REKOMENDASI

Kabupaten Supiori dan Manokwari Selatan

1. Pemerintah Kabupaten Supiori dan Manokwari Selatan perlu meningkatkan pengelolaan sampah secara terintegrasi;
2. Pemerintah Kabupaten Supiori dan Manokwari Selatan perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah;
3. Pemerintah Kabupaten Supiori dan Manokwari Selatan perlu meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan sampah;
4. Meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah dengan memprioritaskan daur ulang dan pengurangan limbah;
5. Melakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor

1. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan pengelolaan limbah medis secara aman dan bertanggung jawab;
2. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan limbah medis;
3. Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Kota Jayapura, dan Kabupaten Biak Numfor perlu meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan limbah medis;
4. Menjalinkan kerjasama dengan fasilitas kesehatan untuk memastikan pengelolaan limbah medis sesuai dengan standar keamanan;
5. Mengimplementasikan sistem pemantauan yang efektif terhadap jumlah dan jenis limbah medis yang dihasilkan.



ARAHAN DAN REKOMENDASI

Kabupaten Yapen

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen perlu meningkatkan kapasitas SDM di bidang monitoring dan evaluasi dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Mendorong penelitian terkait dampak pembangunan terhadap keanekaragaman hayati dan keberlanjutan sumber daya alam;
4. Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi proyek-proyek pembangunan untuk memastikan keberlanjutan dan pemberdayaan lokal.

CAPAIAN REALISASI ANGGARAN 2023

Pagu awal Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua sebesar Rp.13.435.688.000,-. Selama tahun anggaran 2022 perubahan pagu anggaran Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua terjadi sebanyak tiga (3) kali, di sebabkan adanya Automatic Adjustment, dan pemenuhan kebutuhan operasional pimpinan. Perubahan pagu tersebut mengakibatkan Pusat

Pengendalian Pembangunan ekoregion Papua harus melakukan penyesuaian/ adaptasi pelaksanaan kegiatan pada kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung tercapainya target output dan menunda kegiatan-kegiatan pendukung yang dapat di laksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Revisi Pagu Anggaran P3E Papua Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu Awal	Revisi AA	Revisi Penghapusan AA Belanja Pegawai	Revisi Penghapusan AA Belanja Barang	Revisi Penambahan Belanja Pegawai	Pagu Akhir
Belanja Pegawai	3.576.866.000	72.430.000	(72.430.000)	0	134.905.000	3.639.341.000
Belanja Barang	5.094.588.000	130.657.000	0	(130.657.000)		4.963.931.000
Belanja Modal	100.000.000	0	0	0		100.000.000
Jumlah	12.574.561.000	586.062.000	(72.430.000)	(130.657.000)	134.905.000	12.123.404.000

Realisasi anggaran P3E Papua per tanggal 30 November 2023 sebesar Rp. 10.699.644.00 atau 88.26 persen (Sumber: OMSPAN tanggal 30 November 2023). Realisasi anggaran Belanja Modal 99.89 persen. Prognosis realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 11.999.852.630,- atau sebesar 98,98 persen. Sisa Pagu anggaran sebesar Rp. 123.354.370,- atau 1.01 persen di perkirakan adalah belanja pegawai yang tidak dapat di realisasikan sebesar Rp. 86.348.059,-, belanja barang sebesar Rp.37.006.311,- dan belanja modal sebesar Rp. 197.000,-.

Prognosis Realisasi Anggaran Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	Prognosis Realisasi	Prognosis Persen Realisasi	Sisa Anggaran
Belanja Pegawai	3.639.341.000	3.180.857.738	3.552.992.941	97.62	86.348.059
Belanja Barang	8.304063000	7.338.983.915	8.267.056.689	99.55	37.006.311
Belanja Modal	180.000.000	179.803.000	179.803.000	99.89	197.000
Jumlah	12.123.404.000	10.699.644.653	11.999.852.630	98.98	123.354.370



03

RENCANA KERJA 2024

VISI DAN MISI KLHK

Pusat Pengendalian Pembangunan ekoregion Papua adalah Satker yang bertanggungjawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua mendukung tercapainya visi dan misi Sekretariat Jenderal KLHK.

VISI

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” Guna mendukung:
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses Kelola hutan
4. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik

MISI

VISI DAN MISI SEKRETARIAT JENDERAL

VISI



Mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan penggerak tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup KLHK guna menjami terwujudnya keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan masyarakat untuk mendukung : 'terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong'.

MISI



1. Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas bagi stakeholders KLHK
2. Memantapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK
3. Menciptakan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dan Kinerja KLHK.

TUJUAN



Tujuan dari Sekretaris Jenderal merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat Jenderal yang menjelaskan kondisi yang akan di capai secara umum, yaitu:

1. Meningkatnya pelayanan yang efektif dan efisien
2. Memantapkan tata Kelola kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur
3. Mengoptimalkan penyelenggaraan sistem administrasi dan kinerja yang transparan dan akuntabel

Dalam Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2020-2024 Revisi disebutkan terdapat perubahan struktur kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, termasuk juga di lingkup Sekretariat Jenderal. Perubahan tersebut terjadi sehubungan dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan mulai berlaku pada pemerintahan tahun 2023.

Tahun 2024 diberlakukan 13 Sasaran Stragegis (SS) KLHK dimana Sekretariat Jenderal akan mendukung Sasaran Strategis ke 13 yaitu “Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang

Agile, Efektif dan Efisien”. Indikator Kinerja Program adalah Nilai Reformasi Birokrasi.

P3E Papua melaksanakan kegiatan pengendalian pembangunan LHK pada wilayah ekoregion dengan sasaran kegiatan meningkatnya pengendalian pembangunan LHK ekoregion Papua dengan 4 indikator kegiatan yaitu (1) Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3E, (2) Jumlah Pemda di bina dan di fasilitasi di wilayah ecoregion, (3) Nilai Kinerja Anggaran satker P3E Papua sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022: 95.68), dan (4) Evaluasi Nilai Sakip P3E Papua. Target kinerja tahun 2024 ditunjukkan sebagai berikut.

TARGET KINERJA TAHUN 2024

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Satuan
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	Meningkatnya Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Ekoregion Papua	Tingkat kepuasan publik terhadap layanan P3e	4	Poin
		Jumlah Pemda yang difasilitasi dan dibina di wilayah ekoregion	8	Daerah
		Nilai Kinerja Anggaran satker P3E Papua sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022: 95.68)	98.78	Poin
		Evaluasi Nilai Sakip P3E Papua	80	Poin

RINCIAN KEGIATAN

ISU STRATEGIS

Rencana kegiatan pengendalian pembangunan LHK regional di wilayah ekoregion Papua tahun 2024 dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi P3E Papua; Arahan pelaksanaan kegiatan mengacu pada dokumen perencanaan KLHK dan Sekretariat Jenderal dan tertuang di dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 P3E Papua.

Rencana Kerja disusun dengan memperhatikan isu-isu lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah ekoregion Papua. Kondisi lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi dasar disusunnya kegiatan P3E Papua secara umum disampaikan berikut ini:

- 1) Isu pencemaran wilayah ekoregion Papua
- 2) Isu kerusakan wilayah ekoregion Papua
- 3) Isu pengelolaan sampah di wilayah ekoregion Papua
- 4) Isu pengelolaan limbah B3 di wilayah ekoregion Papua
- 5) Isu Perencanaan pembangunan daerah belum sejalan/ sinkron dengan kebijakan/ instrument LHK

6) Isu dampak pembangunan di wilayah ekoregion Papua

Sesuai dengan tugas dan fungsi P3E Papua maka upaya pengendalian pembangunan ekoregion Papua yang dikerjakan sebagai Langkah untuk menghadapi isu lingkungan di Ekoregion Papua yaitu:

1. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.
2. Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion
3. Layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan mengacu pada proses bisnis pengendalian pembangunan ekoregion sebagai berikut.

Indikator Kegiatan 1. Tingkat Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E

A. Ruang Lingkup

Pelaksanaan SKPP dilaksanakan terhadap layanan Bidang Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion, Bidang Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Wilayah Ekoregion, dan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Satker P3E Papua.

B. Persiapan

1. Pelaksana

Pelaksana SKPP adalah Bagian Tata Usaha P3E Papua. Tim Penyusun Survei Kepuasan Pelayanan Publik yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala P3E Papua dengan Nomor: SK.034/P3E.Papua/KBTU/04/2022 Tentang Tim Penyusun Survei Kepuasan Pelayanan Publik Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua.

2. Waktu Pelaksanaan Pengukuran

Pengukuran SKPP dilakukan di setiap kegiatan pada bidang terkait, dengan responden adalah peserta kegiatan. Pengukuran dilaksanakan

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengisian kuisisioner oleh pengguna/penerima layanan P3E Papua. Kuisisioner SKPP diisi dengan memberi skor 1-5 (sangat tidak puas-sangat puas) terhadap unsur layanan P3E Papua.

D. Pengolahan dan Analisa Data

Kuisisioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi Microsoft excel. Proses dan analisis data sesuai dengan petunjuk dalam Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017. Pelaksanaan SKPP dilakukan penyesuaian dengan kondisi spesifik unit/lembaga pelayanan yang bersangkutan, selanjutnya data akan diolah dengan uji statistik untuk memperoleh informasi yang lebih baik terhadap data yang didapat dan.

dan hasil survey dapat lebih bermanfaat.

- Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan metode pengukuran Skala Likert 1. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan.

Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut.

$$\text{Bobot nilai rata - rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = nilai bobot per unsur

Persamaan untuk menghitung Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut.

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20 dengan rumus sebagai berikut.

$$SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 20$$

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu
Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Tingkat kepuasan layanan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua dihitung dari rerata nilai pada 3 jenis layanan menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat kepuasan layanan} = \frac{\sum(\sum TK I + \sum TK II + \sum TK III)}{3}$$

Keterangan:

- TK I = tingkat kepuasan layanan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion
- TK II = tingkat kepuasan layanan pembinaan PPKL, PSLB3 di wilayah ekoregion
- TK III = tingkat kepuasan layanan evaluasi pengendalian pembangunan ekoregion

2. Perangkat Pengolahan

Data entry dan penghitungan survey dapat dilakukan dengan program komputer/ sistem data base (Microsoft Excel).

Target capaian kinerja Tingka Kepuasan Publik terhadap Layanan P3E Papua adalah **4 Poin**.

Indikator Kegiatan 2. Jumlah Pemda yang di Fasilitas dan di Bina di Wilayah Ekoregion

Arahan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua tahun 2024 sesuai Rencana Strategis 2020-2024 P3E Papua diarahkan pada fasilitasi pengendalian Pembangunan ekoregion Papua di 8 Pemda yaitu:

1. Pemda Provinsi Papua Selatan
2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan
3. Pemda Provinsi Papua Tengah
4. Pemda Provinsi Barat Daya
5. Pemda Kabupaten Kaimana
6. Pemda Kabupaten Mimika
7. Pemda Kabupaten Raja Ampat
8. Pemda Kabupaten Sarmi

Fokus layanan fasilitasi yang akan diberikan yaitu terkait isu pencemaran lingkungan, isu kerusakan lingkungan, isu pengelolaan sampah dan isu

pengelolaan limbah B3. Layanan fasilitasi yang akan diberikan kepada 8 Pemda adalah bimbingan dan pengawalan penyusunan dokumen Jakstrada terutama pada Daerah Otonom Baru (DOB), dan P3E Papua akan mengawal pengusulan IKLHK untuk dicantumkan dalam RPJMD Papua Tahun 2025-2029.

Integrasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target Output
Layanan koordinasi perencanaan pembangunan ekoregion	1. Ketidak seimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion	1. Penyusunan rencana inventarisasi dan koordinasi stakeholder 2. Inventarisasi Inventarisasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK di wilayah ecoregion di 8 Pemda	Dokumen rencana pengendalian pembangunan ekoregion yang telah terintegrasi memuat 8 Pemda yang telah di fasilitasi yaitu: 1. Pemda Provinsi Papua Selatan 2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan 3. Pemda Provinsi Papua Tengah 4. Pemda Provinsi Barat Daya 5. Pemda Kabupaten Kaimana 6. Pemda Kabupaten Mimika 7. Pemda Kabupaten Raja Ampat 8. Pemda Kabupaten Sarmi
	2. Belum tersedianya database dokumen perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Papua.	Analisis data dan informasi pengendalian pembangunan ekoregion	Analisis data dan informasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK wilayah ecoregion 8 Pemda	
	3. Perlunya integrasi dokumen perencanaan yang menyeluruh sebagai alat dalam pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua diantaranya yaitu RPJMD, Daya Dukung Daya Tampung, RPPLH, Inventarisasi Kehati, Rencana Pengelolaan lingkup UPT KLHK, KLHS, IKPLHD dan IKLH	Sinkronisasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion	Sinkronisasi perencanaan pengendalian LHK wilayah ecoregion 8 Pemda	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan koordinasi perencanaan pembangunan ekoregion	1. Ketidak seimbangan antara daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan ekoregion	Fasilitasi integrasi perencanaan pengendalian pembangunan LHK di 8 Pemda	
	2. Belum tersedianya database dokumen perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion Papua.			
	3. Perlunya integrasi dokumen perencanaan yang menyeluruh sebagai alat dalam pengendalian pembangunan LHK di Ekoregion Papua diantaranya yaitu RPJMD, Daya Dukung Daya Tampung, RPPLH, Inventarisasi Kehati, Rencana Pengelolaan lingkup UPT KLHK, KLHS, IKPLHD dan IKLH		Peningkatan Kapasitas SDM	

Penerapan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan, Sampah, Limbah B3

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target Output
Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	1. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan di segala aspek. 2. Kebutuhan instrument yang terencana dan komprehensif untuk memadukan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya, politik, lingkungan hidup)	1. Fasilitasi Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion 2. Fasilitasi Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion	1. Penyusunan rencana fasilitasi dan koordinasi stakeholder dalam rangka fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan (PPKL) di wilayah ekoregion Papua 2. Sosialisasi dan bimtek dalam dalam rangka fasilitasi PPKL di 8 Pemda 3. Supervisi, pemantauan dan evaluasi dalam rangka PPKL di 8 Pemda	Laporan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran, kerusakan, pengelolaan sampah dan LB3 yang diberikan kepada 8 Pemda, yaitu: 1. Pemda Provinsi Papua Selatan 2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan 3. Pemda Provinsi Papua Tengah 4. Pemda Provinsi Barat Daya 5. Pemda Kabupaten Kaimana
		Fasilitasi pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) wilayah ekoregion	1. Penyusunan rencana fasilitasi dan koordinasi stakeholder dalam rangka fasilitasi pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) di wilayah ekoregion Papua 2. Sosialisasi dan bimtek dalam rangka fasilitasi PSLB3 di 8 Pemda	

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Pembinaan dan Penerapan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi Penurunan Kualitas Lingkungan hidup sebagai dampak dari pembangunan di segala aspek. 2. Kebutuhan instrument yang terencana dan komprehensif untuk memadukan segala aspek kehidupan (ekonomi, sosial dan budaya, politik, lingkungan hidup) 	Fasilitasi pengelolaan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (PSLB3) wilayah ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 3. Supervisi, pemantauan dan evaluasi dalam rangka fasilitasi PSLB3 di 8 Pemda 4. Sosialisasi pengurangan sampah di Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Kaimana 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Pemda Kabupaten Mimika 7. Pemda Kabupaten Raja Ampat 8. Pemda Kabupaten Sarmi
			Peningkatan kapasitas	

Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target output
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion 2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA 3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara 4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah 5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut 	Evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengendalian pencemaran wilayah ekoregion 2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran di Kab. Raja Ampat dan di Kabupaten Mimika 3. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion 	<p>Laporan evaluasi dampak pembangunan pada 8 Pemda, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Provinsi Papua Selatan 2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan 3. Pemda Provinsi Papua Tengah 4. Pemda Provinsi Barat Daya 5. Pemda Kabupaten Kaimana 6. Pemda Kabupaten Mimika 7. Pemda Kabupaten Raja Ampat 8. Pemda Kabupaten Sarmi

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target output
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion 2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA 3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara 4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah 5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut 	Evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah di Kabupaten Kaimana 2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah di Kabupaten Sarmi 3. Pengumpulan data informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan sampah wilayah ekoregion 	Laporan evaluasi dampak pembangunan pada 8 Pemda, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Provinsi Papua Selatan 2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan 3. Pemda Provinsi Papua Tengah 4. Pemda Provinsi Barat Daya 5. Pemda Kabupaten Kaimana 6. Pemda Kabupaten Mimika 7. Pemda Kabupaten Raja Ampat 8. Pemda Kabupaten Sarmi

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target output
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion 2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA 3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara 4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah 5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut 	Evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah, dan limbah B3 wilayah ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi penerapan pengendalian pengelolaan sampah wilayah ecoregion 2. Monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan sampah di Provinsi Papua Tengah 3. Pengumpulan data informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan limbah B3/ medis di Provinsi Papua Pegunungan 	<p>Laporan evaluasi dampak pembangunan pada 8 Pemda, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda Provinsi Papua Selatan 2. Pemda Provinsi Papua Pegunungan 3. Pemda Provinsi Papua Tengah 4. Pemda Provinsi Barat Daya 5. Pemda Kabupaten Kaimana 6. Pemda Kabupaten Mimika 7. Pemda Kabupaten Raja Ampat 8. Pemda Kabupaten Sarmi

Layanan	Isu LHK di Ekoregion Papua	Strategi Pelaksanaan	Strategi pencapaian Output	Target/ Lokus
Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Wilayah Ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluktuasi angka IKLH di Ekoregion 2. Masih banyaknya kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat yang belum melakukan penghitungan IKA 3. Peningkatan jumlah pencemaran air dan udara 4. Banyaknya kabupaten / kota yang belum menyusun Jakstrada Pengelolaan Sampah 5. Perencanaan lingkungan hidup dan kehutanan di beberapa daerah belum mengacu pada Jasa Ekosistem yang ada pada daerah tersebut 	Evaluasi dampak pembangunan ekoregion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka evaluasi dampak pembangunan ekoregion 2. Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan LHK di Provinsi Papua Barat Daya 3. Monitoring dan evaluasi dampak pembangunan LHK di Provinsi Papua Selatan 	

Indikator Kegiatan 3. Nilai Kinerja Anggaran satker P3E Papua sebagai pembentuk NKA Sekretariat Jenderal (baseline 2022: 95.68)

$$NKA = 50\% \text{ Perencanaan Anggaran (EKA)} + 50\% \text{ Pelaksanaan Anggaran (IKPA)}$$

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah angka hasil melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. NKA merupakan indikator evaluasi kinerja anggaran yang menunjukkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Nilai Kinerja Anggaran diperoleh dari penjumlahan Nilai Perencanaan Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART DJA (50 %) dengan Nilai Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada aplikasi OMSPAN (50%).

1. Pengukuran Evaluasi Kinerja Anggaran

Alat pengukuran EKA adalah PMK 214 Tahun 2014 tentang pengukuran dan evaluasi

kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L. Dalam aturan tersebut dijelaskan 3 aspek pengukuran EKA yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada level satker yang di ukur adalah aspek implementasi yang terdiri dari 4 indikator yaitu:

1. Capaian output level kegiatan
2. Efisiensi
3. Konsistensi dan
4. Penyerapan anggaran

Nilai EKA dapat dilihat pada aplikasi SMART DJA

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 4 aspek yaitu:

1. Kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan
2. Kepatuhan terhadap regulasi
3. Efektifitas pelaksanaan anggaran

4. Efisiensi pelaksanaan anggaran

Penilaian IKPA terdiri dari 13 indicator yaitu:

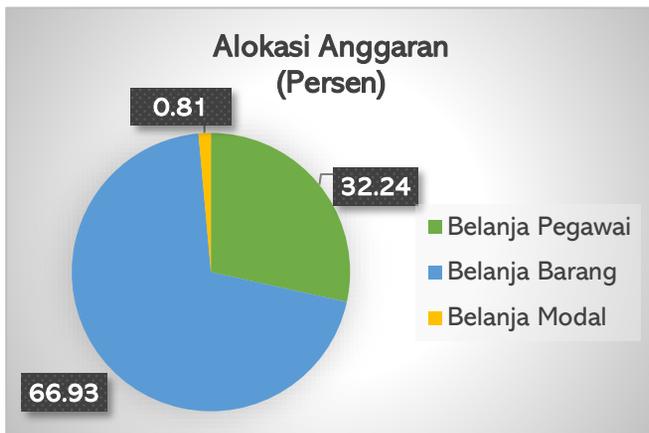
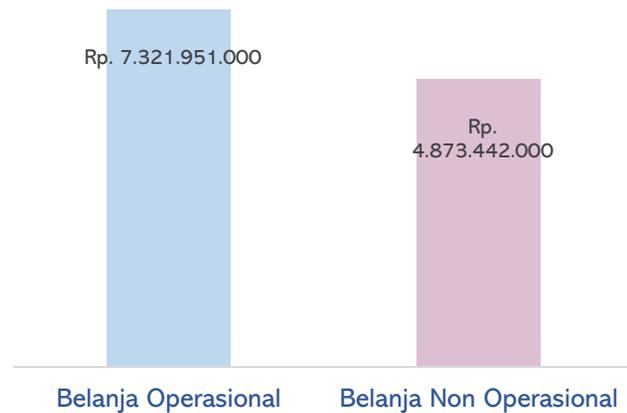
1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Penyampaian Data Kontrak
4. Penyelesaian Tagihan
5. Pengelolaan Uang Pesediaan
6. Penyampaian LPJ Bendahara
7. Realisasi Anggaran
8. Renkas/ RPD Harian
9. Pengembalian/ kesalahan SPM
10. Retur SP2D
11. Pagu Minus
12. Dispensasi SPM
13. Konfirmasi Capaian Output

ANGGARAN

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Jenderal Nomor: M.10/SETJEN/ROCAN/REN.0/10/2023, Pagu anggaran P3E Papua Tahun 2024 bersumber dari Rupiah Murni sebesar Rp. 12.195.393.000,- (Dua Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah). Nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 0.59 persen jika dibandingkan dengan pagu anggaran tahun 2023.

Alokasi anggaran terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 7.321.951.000 dan Belanja Non Operasional sebesar Rp. 4.873.442.000 Berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi 3, yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.932.397.000,-, Belanja Barang sebesar Rp 8.162.996.000,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 100.000.000,-

Jenis Belanja	Pagu Alokasi (Rp.)	Persen
Belanja Pegawai	3.932.397.000	32.24
Belanja Barang	8.162.996.000	66.93
Belanja Modal	100.000.000	0.81
Jumlah	12.195.393.000	



KERANGKA PENDANAAN

Kegiatan	KRO	RO	Target RO	Komponen	Anggaran (Rp. *1000)
Pengendalian Pembangunan LHK Regional	EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal	962. Layanan Umum	1 Layanan	055. Dukungan Manajemen Satker dan Survey Kepuasan	1.785.034
		994. Layanan Perkantoran	2 Layanan	001. Gaji dan Tunjangan	3.932.397
				002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3.389.554
	EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	951. Layanan Sarana Internal	12 Unit	051. Pengadaan Peralatan dan Mesin	100.000
	FBA. Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	005. Layanan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	8 Daerah	051. Layanan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Ekoregion	900.000
				052. Layanan Pembinaan dan Penerapan PPKL, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 di Wilayah Ekoregion	1.188.408.
				053. Layanan Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	900.000

04

PENUTUP



Pengendalian pembangunan bertujuan untuk menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum pelaksanaan pembangunan. Bentuk pengendalian pembangunan adalah dengan menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2024 merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengendalian pembangunan Ekoregion Papua.

Pelaksanaan rencana kerja dijabarkan dalam dokumen perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 bagi bidang/ bagian di lingkup Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua. Namun demikian, apabila sekiranya dibutuhkan penyempurnaan sebagai akibat dari adanya penyesuaian-penyempurnaan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta Rancangan APBN Tahun 2024, maka akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Selain digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA Tahun 2024, rencana kerja tahunan ini juga selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Pusat

Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2024, tentu saja dengan melakukan penyesuaian-penyempurnaan sehubungan dengan kemungkinan akan adanya perubahan-perubahan prioritas dalam APBN Tahun 2024.

Rencana Kerja Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Ekoregion Papua. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerja, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal. Tantangan dalam upaya pengendalian pembangunan ekoregion Papua adalah mempertahankan kualitas lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung namun sekaligus dapat memberikan manfaatnya untuk kepentingan ekonomi, sosial dan ekologi, dalam mendukung pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan umat manusia.



PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA